

## PEMBINGKAIAN SEKSISME DALAM BAHASA POLITIK LEGISLATIF: ANALISIS DISKURSIF-HISTORIS

Anatasya Solin Indah Duniandana<sup>1</sup>, Undang Sudana<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

---

### Informasi Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima 15 Februari 2026

Perbaikan 10 Maret 2026

Disetujui 20 Maret 2026

#### Kata kunci:

Seksisme, 1

Wacana Gender, 2,

Pendekatan Diskursif-

Historis, 3.

### ABSTRAK

Bahasa politik dalam forum legislatif mereproduksi relasi kuasa dan legitimasi nilai tertentu. Penelitian ini bertujuan menganalisis negosiasi seksisme dalam ujaran anggota DPR RI pada rapat Komisi X tanggal 5 Maret 2025 serta dalam respons institusional Komnas Perempuan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka Analisis Wacana Kritis, khususnya Pendekatan Diskursif-Historis (*Discourse-Historical Approach/DHA*) yang dikembangkan oleh Ruth Wodak. Data penelitian berupa klausa dan kalimat yang dikutip dari pemberitaan media daring dan dokumen resmi Komnas Perempuan. Analisis difokuskan pada strategi diskursif yang mencakup penamaan, prediksi, argumentasi, perspektivisasi, serta intensifikasi dan mitigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seksisme dalam wacana legislatif direproduksi secara implisit melalui generalisasi terhadap perempuan, pembatasan peran sosial, serta argumentasi berbasis budaya, utilitas, dan legitimasi simbolik

---

© 2023 MEMACE

---

\*Surat elektronik penulis: [anatasyasi@upi.edu](mailto:anatasyasi@upi.edu)

## PENDAHULUAN

Bahasa yang digunakan dalam ruang politik berperan dalam membentuk cara suatu peristiwa dipahami oleh publik. Dalam kajian Analisis Wacana Kritis, bahasa politik dipandang sebagai praktik sosial yang berkaitan erat dengan kekuasaan karena ujaran yang disampaikan oleh tokoh politik menyampaikan informasi dan membangun legitimasi dan otoritas tertentu (Fairclough, 1995; van Dijk, 2008). Di Indonesia, bahasa yang digunakan dalam forum resmi negara, seperti rapat DPR,

memiliki bobot simbolik yang tinggi karena diproduksi dalam ruang institusional yang sah dan diakui secara politik (Eriyanto, 2018).

Forum legislatif merupakan salah satu ruang politik formal yang berfungsi sebagai arena deliberasi sekaligus pembentukan norma diskursif. Ujaran yang diproduksi dalam forum ini berdampak pada pengambilan keputusan dan turut berkontribusi dalam menentukan batas tentang apa yang dianggap pantas dan tidak pantas untuk diucapkan di ruang publik

(Haryatmoko, 2017). Oleh karena itu, bahasa dalam forum legislatif layak dikaji sebagai objek analisis linguistik, bukan sekadar sebagai bagian dari peristiwa politik.

Salah satu isu yang kerap muncul dalam bahasa politik adalah isu gender. Dalam kajian wacana, wacana gender dipahami sebagai cara bahasa digunakan untuk membentuk, mereproduksi, atau menantang pemaknaan tentang peran, posisi, dan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Wodak, 2001; Wodak & Meyer, 2009). Wacana gender kerap bekerja secara implisit melalui pilihan kata, metafora, atau pembingkai tertentu.

Dalam konteks wacana gender, seksisme dipahami sebagai praktik diskursif yang mereproduksi ketimpangan simbolik melalui bahasa. Seksisme tidak selalu berupa ujaran yang secara terbuka merendahkan perempuan. Seksisme dapat muncul dalam bentuk humor, eufemisme, atau normalisasi tertentu yang menempatkan perempuan sebagai objek (Wodak, 2001). Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa bentuk-bentuk bahasa seksis semacam ini sering kali dianggap wajar karena dibingkai sebagai candaan atau bagian dari budaya (Fitriana, 2019; Wibowo, 2020).

Ketika seksisme muncul dalam bahasa institusional, seperti dalam forum legislatif, dampaknya menjadi lebih substansial. Bahasa institusional memiliki kekuatan simbolik karena diproduksi oleh aktor yang memiliki otoritas dan disampaikan dalam ruang yang dilegitimasi oleh negara. Oleh sebab itu, seksisme dalam bahasa institusional mencerminkan sikap individual penutur serta berpotensi menormalisasi cara pandang tertentu tentang gender di tingkat struktural (Suryakusuma, 2019).

Kasus pernyataan anggota DPR RI dalam rapat Komisi X pada 5 Maret 2025 menjadi contoh konkret bagaimana wacana gender dan seksisme muncul dalam forum legislatif formal.

Respons Komnas Perempuan terhadap pernyataan tersebut, serta pernyataan lanjutan yang membingkai kritik sebagai penerapan “norma Barat”, menunjukkan adanya pertarungan wacana antara aktor-aktor institusional negara. Kasus ini menyediakan konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana seksisme dinegosiasikan secara diskursif dalam ruang politik formal (Utami, 2020).

Di Indonesia, perdebatan mengenai gender sering kali dikaitkan dengan isu budaya dan identitas nasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rujukan terhadap “nilai budaya” atau “budaya bangsa” kerap digunakan untuk merelatifkan kritik terhadap ketimpangan gender (Nurhayati, 2018; Utami, 2020). Pola

ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang patriarki dalam politik Indonesia yang turut memengaruhi cara bahasa digunakan untuk membingkai relasi gender (Suryakusuma, 2019).

Untuk menganalisis dinamika wacana tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Diskursif-Historis (DHA) yang dikembangkan oleh Ruth Wodak. Pendekatan ini memungkinkan analisis bahasa secara rinci sekaligus mempertimbangkan konteks historis dan institusional yang melatarbelakanginya. Dalam DHA, perhatian diberikan pada strategi diskursif, termasuk strategi argumentasi atau topoi, yang digunakan penutur untuk membenarkan atau menolak suatu posisi tertentu (Wodak & Meyer, 2009).

Penelitian ini memfokuskan analisis pada strategi argumentasi yang digunakan dalam ujaran anggota DPR RI dan dalam respons institusional Komnas Perempuan terkait tuduhan seksisme. Data penelitian berupa klausa dan kalimat merepresentasikan cara seksisme dinegosiasikan dalam wacana institusional. Penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia telah membahas wacana politik, gender, dan

bahasa secara terpisah (Eriyanto, 2018; Fitriana, 2019; Suryakusuma, 2019). Hanya saja, belum ada penelitian khusus mengkaji strategi argumentasi dalam ujaran legislatif formal dengan menggunakan Diskursif-Historis.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka Analisis Wacana Kritis (AWK) dan secara khusus menerapkan Pendekatan Diskursif Historis (*Discourse-Historical Approach* atau DHA) sebagaimana dikembangkan oleh Ruth Wodak. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis bahasa secara mendalam dengan tetap mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan institusional yang melatarbelakangi produksi wacana (Wodak & Meyer, 2009). Penelitian bersifat deskriptif-kualitatif dengan berfokus pada penafsiran makna dan strategi diskursif yang digunakan dalam teks. Dalam kerangka DHA, bahasa dipahami sebagai praktik sosial yang selalu terkait dengan relasi kekuasaan dan konteks historis tertentu. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan teks dengan situasi produksi wacana dan posisi institusional para aktor yang terlibat.

Data penelitian berupa data kebahasaan dalam bentuk klausa dan kalimat yang mengandung pernyataan terkait isu gender dan seksisme. Sumber data terdiri atas dua jenis. Pertama, transkrip atau kutipan pernyataan anggota DPR RI yang disampaikan dalam rapat Komisi X DPR RI pada 5 Maret 2025. Kedua, dokumen pernyataan resmi Komnas Perempuan serta pernyataan lanjutan dari aktor terkait yang dimuat dalam media daring nasional. Pemilihan data ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua sumber tersebut merepresentasikan pertarungan wacana antara aktor institusional negara dalam ruang publik formal.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Data dikumpulkan dengan cara menelusuri teks pemberitaan media daring dan dokumen pernyataan resmi yang memuat ujaran relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data kemudian diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan isu seksisme dan respons terhadap tuduhan seksisme dalam forum legislatif. Data yang telah terkumpul ditranskripsikan dan diklasifikasikan untuk keperluan analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah klausa dan kalimat yang memuat strategi diskursif tertentu. Penetapan unit analisis ini selaras dengan DHA yang menekankan analisis mikro-linguistik untuk mengungkap mekanisme makna dalam teks. Fokus analisis diarahkan bagian-bagian ujaran yang menunjukkan pola argumentasi, pbingkai, dan mitigasi makna.

Analisis data dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah analisis dalam pendekatan Diskursif-Historis dengan mengidentifikasi konteks sosial dan institusional dari teks, termasuk posisi penutur dan situasi produksi wacana. Selanjutnya mengidentifikasi strategi diskursif yang muncul dalam data. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada strategi argumentasi, khususnya penggunaan topoi, yaitu pola argumentatif yang digunakan untuk membenarkan atau menolak suatu klaim (Wodak, 2001). Berikutnya menafsirkan bagaimana strategi argumentasi tersebut berfungsi dalam menegosiasikan makna seksisme, baik melalui pbingkai budaya, relativisasi nilai, maupun mitigasi makna. Seluruh temuan kemudian dihubungkan kembali dengan konteks historis dan institusional untuk memahami implikasi wacana yang lebih luas.

Analisis dilakukan secara interpretatif dengan tetap menjaga konsistensi antara data, teori, dan konteks. Untuk menjaga keabsahan

analisis, penelitian ini menerapkan prinsip keterlacakan data, yaitu setiap interpretasi didasarkan pada kutipan teks yang jelas dan dapat ditelusuri sumbernya. Selain itu, penggunaan kerangka teoretis DHA dilakukan secara konsisten agar analisis bertumpu pada mekanisme kebahasaan yang teridentifikasi dalam data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini mencakup dua jenis teks yang diproduksi dalam konteks institusional negara. Teks pertama berupa ujaran lisan anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 5 Maret 2025. Salah satu bagian ujaran tersebut dikutip media sebagai berikut.

*“Tapi, usul saya kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya rambut pirang, mata biru, karena kalau menurut saya untuk Indonesia kurang enak dilihat.”*

Teks kedua berupa pernyataan resmi Komnas Perempuan yang dirilis pada 6 Maret 2025 sebagai respons institusional terhadap ujaran tersebut.

*“Pernyataan Ahmad Dhani melecehkan perempuan karena menempatkan perempuan sekadar mesin reproduksi anak, pelayan seksual suami.”*

Dalam perspektif Diskursif-Historis, konteks produksi teks menjadi elemen analitis yang krusial. Rapat Komisi X merupakan forum resmi negara yang dilegitimasi secara politik dan simbolik sehingga ujaran yang disampaikan di dalamnya tidak dapat diperlakukan sebagai opini personal semata. Demikian pula, pernyataan Komnas Perempuan merupakan

representasi sikap lembaga negara independen yang memiliki mandat konstitusional dalam isu kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Karakter teks yang dianalisis bersifat berlapis, bergerak dari ujaran lisan, direproduksi oleh media, kemudian diformalisasi dalam dokumen institusional. Rantai produksi dan sirkulasi wacana ini menunjukkan bahwa makna ujaran terbentuk melalui interaksi antara bahasa, institusi, dan relasi kuasa, sejalan dengan prinsip dasar DHA.

### Strategi Penamaan

Strategi penamaan dalam wacana ini memperlihatkan bagaimana aktor sosial dan kelompok tertentu dikonstruksi sejak awal. Dalam ujaran Ahmad Dhani, perempuan dihadirkan sebagai kategori kolektif yang homogen, seperti terlihat dalam frasa *“perempuan Indonesia”*. Penyebutan ini bersifat generalisasi sehingga perempuan tidak tampil sebagai aktor dengan kehendak, suara, atau posisi sosial yang spesifik.

Sebaliknya, aktor laki-laki yang dibicarakan justru dipersonalisasi secara lebih rinci, misalnya melalui penyebutan *“pemain bola hebat di atas usia 40”* atau *“yang duda”*. Perbedaan ini menunjukkan adanya asimetri diskursif dalam penamaan ketika laki-laki dikonstruksi sebagai subjek aktif dan potensial, sementara perempuan direduksi menjadi kategori sosial yang pasif. Dalam pernyataan Komnas Perempuan, strategi penamaan bergerak ke arah sebaliknya. Ahmad Dhani disebut secara eksplisit sebagai *“anggota DPR Ahmad Dhani”*, dan tindakannya dinamai secara langsung sebagai *“pernyataan yang melecehkan perempuan”*. Strategi ini memperjelas relasi tanggung jawab dan menolak pengaburan aktor dalam wacana.

### Strategi Predikasi

Strategi predikasi tampak dalam cara penilaian dilekatkan pada aktor serta

tindakannya. Ahmad Dhani memberi prediksi positif terhadap gagasan yang ia ajukan melalui ungkapan “*pemikirannya memang agak out of the box*”. Prediksi ini berfungsi membingkai usulan sebagai inovatif dan kreatif sehingga potensi problematis dari isi gagasan tersebut menjadi tersamarkan.

Sementara itu, perempuan tidak dipredikasikan secara eksplisit sebagai aktor sosial, tetapi secara implisit dilekatkan dengan fungsi biologis dan domestik. Hal ini tampak dalam konstruksi kalimat yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang “dijodohkan” dan diharapkan melahirkan anak atlet. Prediksi implisit semacam ini penting dalam analisis DHA karena menunjukkan bahwa seksisme bekerja melalui pembatasan peran dan reduksi makna sosial. Berbeda dengan itu, Komnas Perempuan menggunakan prediksi evaluatif yang eksplisit dengan menyebut ujaran tersebut sebagai “*melecehkan perempuan*” dan “*menempatkan perempuan sekadar mesin reproduksi anak*”. Prediksi ini membongkar makna implisit yang sebelumnya dinormalisasi dalam wacana legislatif.

### **Strategi Argumentasi**

Strategi argumentasi menjadi inti analisis karena di sinilah pembenaran dan penolakan terhadap tuduhan seksisme dinegosiasikan. Dalam pernyataan Ahmad Dhani mengenai kriteria fisik pemain, klaim bahwa pemain tertentu “kurang enak dilihat” dibenarkan melalui rujukan pada kesesuaian visual dengan identitas nasional. Pola ini menunjukkan penggunaan *topos budaya*, yaitu asumsi bahwa suatu pilihan dianggap sah karena selaras dengan gambaran kolektif tentang “kita”.

Dalam usulan penjadwalan pemain asing dengan perempuan Indonesia, muncul topos utilitas, sebagaimana tampak dalam pernyataan bahwa anak hasil pernikahan tersebut diharapkan menjadi pemain sepak bola yang

unggul. Argumen ini membenarkan tindakan dengan merujuk pada manfaat masa depan, sekaligus mengabaikan implikasi etis dan relasi kuasa yang terkandung di dalamnya. Selain itu, rujukan pada kemungkinan poligami melalui identitas agama menunjukkan penggunaan topos legitimasi, yang berfungsi menormalkan praktik gender tertentu dengan mengaitkannya pada nilai simbolik yang sulit dipersoalkan.

Sebaliknya, Komnas Perempuan menggunakan topos akibat dengan menilai ujaran tersebut berdasarkan dampak diskursifnya terhadap martabat perempuan. Dengan merujuk pada CEDAW dan tujuan pembangunan berkelanjutan, Komnas Perempuan juga mengaktifkan topos otoritas hukum. Pertarungan antar-*topoi* ini menunjukkan bahwa seksisme tidak diperdebatkan secara langsung, melainkan melalui perbedaan kerangka penalaran yang digunakan oleh masing-masing aktor.

### **Strategi Perspektivisasi**

Strategi perspektivisasi terlihat dari cara penutur memosisikan dirinya dalam wacana. Penggunaan ungkapan “*menurut saya*” oleh Ahmad Dhani berfungsi sebagai penanda subjektivitas yang menciptakan jarak antara penutur dan konsekuensi sosial dari ucapannya. Dengan strategi ini, penutur memosisikan diri seolah-olah sebagai pengamat netral yang sekadar mengemukakan pendapat.

Perspektif perempuan tidak hadir secara langsung dalam wacana ini. Perempuan dibicarakan sebagai objek diskusi, bukan sebagai subjek yang memiliki suara. Representasi perspektif perempuan dihadirkan melalui Komnas Perempuan sebagai lembaga, bukan melalui pengalaman individual perempuan. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan akses terhadap ruang ujaran dan menguatkan relasi kuasa dalam produksi wacana.

### Strategi Intensifikasi

Strategi mitigasi tampak dalam penggunaan eufemisme dan humor ringan, seperti penyebutan gagasan sebagai “*out of the box*”. Strategi ini melemahkan kesan problematis dari ujaran dan berfungsi mengurangi tanggung jawab penutur atas implikasi sosial ucapannya. Dalam konteks DHA, mitigasi semacam ini penting karena menunjukkan bagaimana makna seksisme dapat dinegosiasikan dan dinormalisasi.

Sebaliknya, Komnas Perempuan menggunakan strategi intensifikasi dengan memilih leksikon yang kuat dan evaluatif, seperti “*melecehkan perempuan*” dan “*melanggar hak asasi perempuan*”. Intensifikasi ini bertujuan mempertegas bobot pelanggaran dan mencegah pelemahan makna melalui relativisasi budaya atau humor.

Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa strategi penamaan yang menggeneralisasi perempuan, prediksi implisit yang mereduksi peran sosial, argumentasi berbasis budaya dan utilitas, perspektivisasi yang menjauhkan penutur dari dampak, serta mitigasi melalui eufemisme membentuk pola diskursif yang konsisten. Strategi-strategi tersebut bekerja saling menopang dalam menormalisasi seksisme secara implisit dalam forum legislatif.

Implikasi temuan ini menunjukkan bahwa bahasa politik di institusi legislatif Indonesia masih menyediakan ruang bagi reproduksi relasi gender yang timpang melalui strategi diskursif yang tampak rasional dan pragmatis. Pendekatan Diskursif-Historis memungkinkan pembacaan seksisme secara non-normatif dengan menempatkan ujaran dalam konteks historis, institusional, dan relasi kuasa. Penelitian ini berkontribusi pada kajian wacana dan gender dengan menunjukkan bagaimana seksisme bekerja tidak selalu melalui ujaran kasar. Seksisme bisa hadir melalui mekanisme diskursif yang terselubung.

### SIMPULAN

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa seksisme dalam wacana legislatif beroperasi sebagai praktik diskursif yang terstruktur dan dapat diprediksi. Melalui pendekatan Diskursif-Historis, terlihat bahwa seksisme dinegosiasikan melalui kombinasi strategi penamaan, prediksi, argumentasi, dan mitigasi yang saling menopang. Pola ini memungkinkan representasi yang mereduksi perempuan tetap beredar dalam ruang formal negara tanpa harus dinyatakan secara eksplisit sebagai ujaran diskriminatif.

Perempuan dikonstruksi sebagai kategori kolektif yang pasif, sementara aktor laki-laki diposisikan sebagai subjek rasional dan pengambil keputusan. Pola representasi ini diperkuat oleh argumentasi berbasis budaya, utilitas, dan legitimasi simbolik, yang berfungsi menormalisasi ketimpangan relasi gender sebagai sesuatu yang wajar, pragmatis, atau kontekstual. Dengan demikian, seksisme bekerja melalui pembatasan makna dan peran sosial yang tampak netral.

Respons institusional terhadap wacana tersebut memperlihatkan pola diskursif yang berbeda. Sementara lembaga pengawas gender mengoperasikan kerangka akibat dan otoritas hukum untuk mendefinisikan seksisme sebagai persoalan relasi kuasa dan martabat, posisi diskursif yang tidak setara membuat kontestasi makna berlangsung dalam medan yang timpang. Hal ini menunjukkan bahwa konflik wacana tidak semata berkaitan dengan perbedaan pendapat, tetapi dengan perbedaan akses terhadap legitimasi simbolik dalam institusi negara.

Pendekatan Diskursif-Historis efektif digunakan untuk membaca seksisme sebagai proses sosial yang dinormalisasi melalui bahasa. Dengan menempatkan ujaran dalam konteks historis dan institusionalnya, DHA

memungkinkan analisis yang menyingkap mekanisme diskursif yang kerap luput dalam pembacaan normatif. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan pola diskursif tersebut dalam konteks bahasa politik legislatif Indonesia, yang selama ini relatif jarang dianalisis secara sistematis dalam kajian wacana dan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Longman.
- Eriyanto. (2018). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKiS.
- Haryatmoko. (2017). *Critical discourse analysis (analisis wacana kritis): Landasan teori, metodologi, dan penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kompas.com. (2025, 7 Maret). *Ini bunyi usulan Ahmad Dhani soal naturalisasi PSSI yang dikecam*. <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/03/07/040000088/ini-bunyi-usulan-ahmad-dhani-soal-naturalisasi-pssi-yang-dikecam?page=2>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025, 6 Maret). *Pernyataan sikap Komnas Perempuan atas pernyataan seksis anggota DPR RI dalam Rapat Komisi X DPR RI 5 Maret 2025*. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-seksis-anggota-dpr-ri-dalam-rapat-komisi-x-dpr-ri-5-maret-2025>
- Suryakusuma, J. (2019). *State ibuisism: The social construction of womanhood in New Order Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Utami, S. (2020). Wacana gender dan negosiasi nilai budaya dalam ruang publik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 145–160.
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. New York: Palgrave Macmillan.
- Wodak, R. (2001). What CDA is about: A summary of its history, important concepts, and its developments. In R. Wodak & M. Meyer, *Methods of critical discourse analysis*. London: Sage.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2009). *Methods of critical discourse analysis*. London: Sage.
- Brooks, C. (1947). *The Well Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry*. Harcourt Brace & World.